

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN KONSEP TRI HITA KARANA UNTUK KEGIATAN EKOWISATA*

I Wayan Runa**

Abstract

Balinese society has from a long time ago managed and developed their land based on environmentally friendly principles. These principles have been inspired by implementations of the Balinese Tri Hita Karana conception. This article attempts to explain various spatial developments relating to ecotourism activities that are founded by Tri Hita Karana values and practices. It constructs its arguments by conducting an intensive literature study to review relevant hypotheses and concepts proposed by scholars in the field. The article concludes that ecotourism is a form of environmentally friendly tourist developments and is seen to be the most sustainable model for future's tourism. The article completes its conclusion by underlining that for its success, ecotourism related development practices should be first understood. It then should come with a certain framework and standard for its implementations. Best practices pertaining to the ecotourism development should be certified and accessible by public and others parties involved. In addition to these remarks, the article conclusively proposes Tri Hita Kharana conception as a framework that offers guidance for sustainably developed ecotourism. This local concept also provides direction as to how its development and its impact on spatial development can be approached and managed, especially to the case of Bali.

Key Words: Sustainable Development, Local Wisdom, Tri Hita Karana, Ecotourism.

* Tulisan ini awalnya merupakan makalah yang disampaikan pada Seri Seminar Arsitektur ke-2 dengan tema "Perencanaan Kota Ekowisata", Sabtu, 12 Mei 2012 di Hotel Nikki/Hotel Puri Ayu, Denpasar.

** Guru Besar Konservasi Arsitektur, Arsitek Madya IAI Bali dan Dosen Fakultas Teknik Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Warmadewa Denpasar. Email: sarwaguna@yahoo.co.id

1. Pendahuluan

Dunia saat ini sedang mengalami persoalan lingkungan hidup yang besar mencakup ledakan jumlah penduduk, berkurangnya sumber daya alam (SDA), perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat, peningkatan polusi, dan kemiskinan. Permasalahan nyata yang dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia adalah terjadinya bencana alam banjir, longsor, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Secara statistik, bencana alam di seluruh Indonesia tahun 2005 – 2006 mencatat 330 bencana banjir dengan 528 korban jiwa, 69 bencana tanah longsor dengan 127 korban jiwa, 7 bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi dengan 5839 korban jiwa.

Seiring dengan perjalanan waktu, kondisi sda yang makin berkurang atau langka adalah minyak, air, dan udara bersih. Pada saat yang sama ketergantungan akan sda itu makin meningkat atau sangat dibutuhkan. *The economists said that is goodthe price goes up?* Bertemuinya kedua kondisi/kepentingan itu tentu akan sangat membahayakan bagi kelangsungan peradaban di bumi. Air menyusun lebih dari 2/3 permukaan bumi, kurang dari 0.5% tersedia untuk digunakan manusia. Kekurangan air untuk minum dan sanitasi sering disebabkan oleh ketidakefisienan suplai dan pelayanan daripada kekurangan air. Masalah - masalah di atas dipercaya oleh berbagai ahli ditimbulkan oleh pembangunan yang tidak berkelanjutan.

Perkembangan ekowisata di Bali yang sangat signifikan adalah pembentukan MEI di Bali 1996, prinsip dan kriteria September 2002, prinsip dan kriteria ekowisata nasional 2006, yang lain-lain seperti Alas Kedaton, Wenara Wana, Sangeh, JED oleh Yayasan Wisnu, Sua Bali, Terumbu Karang Pemuteran, Les, Pendakian Gunung Batur. Kini istilah ekowisata banyak diplesetkan pemakaiannya menjadi wisata alam.

Masyarakat Bali sejak dahulu memiliki kearifan dalam mengelola lingkungan atau mengembangkan lahan secara

komprehensif berdasarkan konsep *Tri Hita Karana*. Tulisan berikut ini akan mencoba memaparkan secara garis besar pembangunan (pengembangan lahan) berkelanjutan berdasarkan konsep *Tri Hita Karana* untuk kegiatan ekowisata.

2. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (Brundtland Report, 1987). Banyak laporan PBB, yang terakhir adalah laporan dari KTT Dunia 2005, yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat. Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian orang lain, konsep pertumbuhan ekonomi itu sendiri bermasalah, karena sumberdaya bumi itu sendiri terbatas.

Emil Salim (1980 dalam Anonim, 1992) menyatakan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan mengandung arti bahwa dalam setiap gerak pembangunan harus mempertimbangkan aspek lingkungan. Pembangunan adalah suatu proses jangka panjang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari satu generasi ke generasi, dalam kurun waktu yang tidak terbatas.

Pembangunan berlanjut untuk Bali tidak hanya mempertimbangkan kesinambungan sumber daya alam sebagai kebutuhan dasar untuk hidup, tetapi juga kesinambungan sumber daya budaya (dari nilai dan legenda sampai upacara dan bangunan kuno). Akan tetapi, pertimbangan kesinambungan budaya tidak akan menghalangi adanya kemungkinan perubahan penampilan budaya dari waktu ke waktu, karena

budaya itu bersifat dinamis. Untuk mendukung pembangunan berlanjut (PBB, 1991 dalam Anonim, 1992) maka ada tujuh kriteria yaitu keutuhan ekologi, efisiensi, pemerataan, keutuhan budaya, komunitas, keseimbangan, dan pembangunan sebagai perwujudan potensi yang ada.

Pertanian merupakan dasar perekonomian Bali, tetapi lahan pertanian mengalami penurunan terus menerus. Penyebab utamanya adalah perluasan kota dan perubahan lahan yang berkaitan dengan pariwisata. Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya jumlah wisatawan telah mendorong peningkatan jumlah limbah terutama di kota Denpasar. Masalah atau tekanan yang lain di daerah perkotaan berkaitan dengan kualitas air dan kerusakan terumbu karang.

Sejak tahun 1990-an di dunia internasional telah berkembang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment* (SEA). KLHS merupakan suatu proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis. KLHS merupakan penyempurnaan dari AMDAL sebagai instrumen lingkungan hidup yang sudah ada sebelumnya. Jika AMDAL hanya hadir pada tingkat proyek, maka KLHS ada pada Kebijakan, Rencana, dan atau Program (KRP) pembangunan.

Aspek-aspek Pembangunan Berkelanjutan

World Summit on Sustainable Development Johannesburg, South Africa, 26 Agustus - 4 September 2002 menyimpulkan 6 (enam) aspek terkait dengan pembangunan berkelanjutan seperti perubahan iklim, penanggulangan bencana, keragaman biologi, keragaman budaya, pengetahuan indigenous atau pengetahuan lokal, dan kesetaraan gender. Berikut ini uraian lebih detail keenam aspek itu.

Perlu pemahaman dan perhatian semua pihak terhadap dampak pemanasan global. Meningkatkan "*climate literacy*"

para angkatan muda. Merubah sikap dan perilaku terhadap kecenderungan berkaitan dengan perubahan iklim. Pendekatan pembelajaran inovatif dengan mengintegrasikan pendidikan perubahan iklim dalam sekolah.

Menumbuhkan pemikiran kritis pemecahan masalah dan keterampilan hidup sosial untuk pemberdayaan kelompok terkena bencana. Pendidikan interdisipliner dan holistik untuk membentuk masyarakat fleksibel. Pendidikan interdisipliner dan holistik untuk membentuk masyarakat fleksibel. DRR berlandaskan hubungan antar masyarakat, lingkungan, ekonomi dan budaya serta dampaknya. Berkembang suatu perspektif jangka panjang dalam proses pembuatan keputusan, berpikir kritis, pendekatan holistik dan inovatif dalam pemecahan masalah

Karagaman biologi terdiri atas gen, spesies, ekosistem dan lansekap. Aktivitas manusia, peningkatan populasi, perubahan iklim global akan mengurangi keragaman biologi dalam ekosistem. Diperlukan pemahaman akademik, pengembangan skill, adopsi sikap dan perilaku yang kondusif untuk mempertahankan keragaman biologi.

"Our rich diversity... is our collective strength." (Johannesburg Declaration, 2002). Ragam budaya dunia menkreasi suatu rajutan yang sangat bernilai. Ragam skills dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai pengetahuan masa lalu penting untuk mengisi hidup dimasa datang. Ragam budaya merupakan media utama menuju pengembangan berkelanjutan untuk individu, komunitas, dan bangsa. Pendidikan ragam budaya perlu untuk saling menghormati, melindungi, dan menjaga keragaman budaya dunia sekarang dan dimasa datang

Pengetahuan *indigenous* (lokal) dalam perspektif pembangunan berkelanjutan dapat diintegrasikan ke dalam program pendidikan pada berbagai level sejauh relevan. Pengetahuan lokal termasuk bahasa adalah bagian dari keragaman dan sumber daya utama untuk memahami dan memanfaatkan

lingkungan secara baik. Budaya mesti dihargai sebagai konteks hidup yang dinamis, dimana manusia mendapatkan nilai-nilai dan identitasnya. ***Tri Hita Karana sebagai indigenous knowledge mengatur hubungan manusia dengan pencipta, antar manusia, dan manusia dengan lingkungannya.***

Diskriminasi sering memperlemah ikatan masyarakat. Wanita sering di luar pengambil keputusan keluarga dan masyarakat. Penguatan wanita adalah krusial untuk pengembangan berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan. Kesehatan sebagai dampak dari aktivitas manusia dan cerminan hubungan manusia dengan lingkungan dan karakteristik keseharian hidupnya. Perlu promosi kesehatan dengan memberikan kemampuan manusia dalam meningkatkan pengendalian dan perbaikan kesehatan.

Pendidikan, pengurangan kemiskinan dan kehidupan berkelanjutan saling berkaitan. Kemiskinan dipengaruhi oleh lingkungan dan sosio-ekonomik yang tidak baik. Pendidikan yang relevan mempunyai kekuatan untuk mentransformasi kehidupan masyarakat.

Sebagai dampak dari aktivitas manusia, kesehatan cerminan hubungan manusia dengan lingkungan dan karakteristik keseharian hidupnya. Selanjutnya perlu promosi kesehatan yang memberikan kemampuan kepada manusia dalam meningkatkan pengendalian dan perbaikan kesehatannya. Pendidikan adalah cara baik untuk melakukan perubahan perilaku berkenaan dengan kesehatan. Kelaparan, malnutrisi, malaria, *water-borne diseases, drug and alcohol abuse, violence and injury, unplanned pregnancy, HIV and AIDS and other sexually transmitted infections* adalah hanya beberapa masalah yang berkaitan dengan kemiskinan.

Pada zaman globalisasi konsumen sebagai aktor kuat dalam ekonomi dunia. Pilihan keseharian sebagai konsumen berpengaruh terhadap pekerja-pekerja di tempat lain yang jauh dan cara hidup masyarakat. Konsumsi berkelanjutan berarti

membeli sesuatu baik barang dan jasa yang tidak merusak lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Konsumsi adalah *entry point* yang baik untuk mengajarkan pengembangan berkelanjutan.

Skema pembangunan berkelanjutan pada titik temu tiga pilar tersebut, Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (UNESCO, 2001) lebih jauh menggali konsep pembangunan berkelanjutan dengan menyebutkan bahwa keragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi alam. Dengan demikian pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual. Dalam pandangan ini, keragaman budaya merupakan kebijakan keempat dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Beberapa riset memulai dari definisi ini untuk berargumen bahwa lingkungan merupakan kombinasi dari alam dan budaya. Mereka mengintegrasikan kapasitas multidisiplin dan menerjemahkan keragaman budaya sebagai kunci pokok strategi baru bagi pembangunan berkelanjutan. Beberapa peneliti lain melihat tantangan sosial dan lingkungan sebagai kesempatan bagi kegiatan pembangunan. Hal ini nyata di dalam konsep keberlanjutan usaha yang mengkerangkai kebutuhan global ini sebagai kesempatan bagi perusahaan privat untuk menyediakan solusi inovatif dan kewirausahaan. Pandangan ini sekarang diajarkan pada beberapa sekolah bisnis yang salah satunya dilakukan di *Center for Sustainable Global Enterprise at Cornell University*.

Pembangunan hijau pada umumnya dibedakan dari pembangunan berkelanjutan, dimana pembangunan Hijau lebih mengutamakan keberlanjutan lingkungan di atas pertimbangan ekonomi dan budaya. Pendukung pembangunan berkelanjutan berargumen bahwa konsep ini menyediakan konteks bagi keberlanjutan menyeluruh dimana pemikiran mutakhir dari Pembangunan Hijau sulit diwujudkan. Sebagai

contoh, pembangunan pabrik dengan teknologi pengolahan limbah mutakhir yang membutuhkan biaya perawatan tinggi sulit untuk dapat berkelanjutan di wilayah dengan sumber daya keuangan yang terbatas.

Divisi PBB mendaftarkan beberapa lingkup sebagai bagian pembangunan berkelanjutan yaitu Pertanian, Atmosfer, Keanekaragaman Hayati, Bioteknologi, Pengembangan Kapasitas, Perubahan Iklim, Pola Konsumsi dan Produksi, Demografi, Penggurunan dan Kekeringan, Pengurangan dan Manajemen Bencana, Pendidikan dan Kesadaran, Energi, Keuangan, Hutan, Air Minum, Kesehatan, Pemukiman, Indikator, Industri, Informasi bagi Pembuatan keputusan dan Partisipasi, Pembuatan Keputusan yang terintegrasi, Hukum Internasional, Kerjasama Internasional memberdayakan lingkungan, Pengaturan Institusional, Pemanfaatan lahan, Kelompok Besar, Gunung, Strategi Pembangunan Berkelanjutan Nasional, Samudera dan Laut, Kemiskinan, Sanitasi, Pengetahuan Alam, Pulau kecil, Wisata Berkelanjutan, Teknologi, Bahan Kimia Beracun, Perdagangan dan Lingkungan, Transport, Limbah (Beracun), Limbah (Radio aktif), Limbah (Padat), serta Air.

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang ambigu, dimana pandangan yang luas berada di bawah naungannya. Konsep ini memasukkan pemahaman keberlanjutan lemah, keberlanjutan kuat, dan ekologi mendalam. Konsep yang berbeda juga menunjukkan tarik ulur yang kuat antara eko(lingkungan)sentrisme dan antropo(manusia)sentrisme.

3. Prinsip-Prinsip Dan Kriteria Ekowisata Nasional

Ekowisata adalah penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di tempat-tempat alami dan/atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaedah alam, yang mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Ekowisata adalah pariwisata ramah lingkungan yang menjadi

trend ke depan. Hal itu harus diikuti dengan pemahaman konsep, penetapan standar, dan sertifikasi yang semuanya itu menjadi kompetisi di era global. Sertifikasi membantu karena konsumen mudah memilih, mendorong perbaikan berlanjut, menjaga lingkungan, kontribusi terhadap masyarakat lokal dan konservasi, serta meningkatkan profit.

Sesuai dengan hasil lokakarya dalam Pelatihan Ekowisata Nasional di Bali 25-26 Agustus 2006 maka ada 9 (sembilan) prinsip ekowisata yaiyu:

1. Peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat.
2. Memiliki kepedulian, komitmen dan tanggung jawab terhadap konservasi alam dan warisan budaya.
3. Menyediakan interpretasi yang memberikan peluang kepada wisatawan untuk menikmati alam dan meningkatkan kecintaanya terhadap alam.
4. Edukasi: ada proses pembelajaran dialogis antara masyarakat dengan wisatawan.
5. Pengembangannya harus didasarkan atas persetujuan masyarakat setempat melalui musyawarah.
6. Memberdayakan dan mengoptimalkan partisipasi serta sekaligus memberikan kontribusi secara kontinyu terhadap masyarakat setempat.
7. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Secara konsisten memberikan kepuasan kepada konsumen.
9. Dipasarkan dan dipromosikan dengan jujur dan akurat sehingga sesuai dengan harapan pemasaran yang bertanggung jawab.

Selanjutnya setiap prinsip dijabarkan kedalam beberapa kriteria sesuai dengan uraian berikut ini.

Prinsip 1 (Peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat), kriterianya adalah:

- (a). Sistem pengelolaan yang serasi dan seimbang sesuai dengan konsep masyarakat setempat, seperti *Tri Hita Karana*: memperhatikan keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*parhyangan*), hubungan antara manusia dengan manusia (*pawongan*), hubungan

antara manusia dengan lingkungan (*palemahan*).

- (b). Pembangunan dan operasional disesuaikan dengan tata krama, norma setempat dan kearifan lokal.
- (c). Keberadaan dan kegiatan objek ekowisata tidak mengganggu aktivitas keagamaan masyarakat setempat.

Prinsip 2 (Memiliki kepedulian, komitmen dan tanggung jawab terhadap konservasi alam dan warisan budaya), kriterianya adalah:

- (a). Tercapainya keseimbangan pemanfaatan lahan.
- (b). Penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (c). Pemanfaatan areal warisan budaya sebagai objek ekowisata disesuaikan dengan peruntukkan dan fungsinya.
- (d). Melestarikan keanekaragaman hayati dan cagar budaya sesuai dengan daya dukung setempat.
- (e). Memperhatikan keberadaan endemisitas.

Prinsip 3 (Menyediakan interpretasi yang memberikan peluang kepada wisatawan untuk menikmati alam dan meningkatkan kecintaannya terhadap alam), kriterianya adalah:

- (a). Menyediakan pramuwisata profesional dan berlisensi.
- (b). Menyediakan fasilitas pendukung dan informasi yang memadai terkait dengan objek ekowisata.
- (c). Melibatkan lembaga adat setempat.

Prinsip 4 (Edukasi: ada proses pembelajaran dialogis antara masyarakat dengan wisatawan), kriterianya adalah:

- (a). Melibatkan unsur akademis, pemerhati lingkungan, serta lembaga terkait (langsung atau tidak langsung).
- (b). Memberikan pemahaman mengenai keanekaragaman hayati, cagar budaya dan nilai-nilai budaya lokal.
- (c). Menumbuhkan kesadaran dan kecintaan terhadap alam dan budaya.

Prinsip 5 (Pengembangannya harus didasarkan atas persetujuan masyarakat setempat melalui musyawarah), kriterianya adalah:

- (a). Perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan pengawasannya perlu mendapat persetujuan masyarakat setempat.
- (b). Melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat dalam setiap tahap pengembangannya.
- (c). Melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak luas terhadap masyarakat, lingkungan, dan perusahaan.

Prinsip 6 (Memberdayakan dan mengoptimalkan partisipasi serta sekaligus memberikan kontribusi secara kontinyu terhadap masyarakat setempat), kriterianya adalah:

- (a). Memprioritaskan pemanfaatan tenaga kerja lokal sesuai dengan keahlian.
- (b). Memprioritaskan pemanfaatan produk lokal untuk operasional objek ekowisata.
- (c). Melibatkan lembaga adat/tradisional serta tokoh masyarakat setempat.

Prinsip 7 (Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku), kriterianya adalah:

- (a). Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (b). Mentaati dan menghormati kearifan lokal yang dianut masyarakat setempat.

Prinsip 8 (Secara konsisten memberikan kepuasan kepada konsumen), kriterianya adalah:

- (a). Memberikan pelayanan informasi yang akurat kepada konsumen.
- (b). Menyediakan fasilitas dan memberikan pelayanan prima kepada konsumen.
- (c). Memanfaatkan masyarakat setempat sebagai *local guide*.
- (d). Menyediakan fasilitas dan media untuk memperoleh umpan balik dari konsumen.

Prinsip 9 (Dipasarkan dan dipromosikan dengan jujur dan akurat sehingga sesuai dengan harapan / pemasaran yang bertanggung jawab), kriterianya:

- (a). Materi pemasaran harus akurat, jelas, berkualitas, dan sesuai dengan kenyataan.

- (b). Materi pemasaran harus melalui media promosi yang dipilih sesuai dengan *target market*.

4. Konsep dan Kriteria Tri Hita Karana DTW

Secara terminologis, *tri* berarti tiga, *hita* (sejahtera/bahagia), *karana* (sebab). Jadi, *Tri Hita Karana* berarti tiga unsur atau lapisan penyebab timbulnya kebahagiaan, atau tiga faktor untuk mewujudkan kesejahteraan hidup lahir dan batin. Di lingkungan Bali (Hindu), ketiga lapisan itu (Bapedalda, 2012) meliputi *Parhyangan* (lingkungan/lapisan dan nilai-nilai spiritual), *Pawongan* (lingkungan/lapisan sosio-kultural), *Palemahan* (lingkungan/lapisan fisik-alamiah).

Konsep *Tri Hita Karana* yang lebih mendalam dikemukakan oleh Kaler (1982). Ketiga lapisan/unsur itu diidentifikasi sebagai jiwa, tenaga, dan fisik. Kemudian pada *bhuana alit* (manusia) ketiga unsur itu adalah *atma*, *prana* dan *sarira*, sedangkan pada *buana agung* (alam raya) adalah *paramatma* (Hyang Widhi), *prana* (tenaga alam), dan *panca mahabhuta* (tanah, air, api/sinar, udara, ether). Di dalam sebuah desa, ketiga unsur itu adalah *bhatara* (zat gaib-Nya), *krama desa* (anggota masyarakat), dan tanah wilayah desa termasuk daerah pemukiman, pura, serta kuburan.

Yayasan Tri Hita Karana telah menjabarkan lebih detail konsep *Tri Hita Karana* ini menjadi beberapa kriteria pada berbagai kelompok fungsi bangunan, seperti hotel, daerah tujuan wisata, kantor, kampus, sekolah menengah, rumah sakit, dan swalayan. Setiap tahun yayasan ini juga telah memberikan penghargaan berupa Tri Hita Karana Awards and Accreditation. Bobot penilaian terbesar (40 %) diberikan pada faktor *pawongan*, sedangkan faktor *parhyangan* dan *palemahan* masing-masing sebesar 30%. Hal ini terjadi karena faktor manusia memegang peranan penting bagi terciptanya keseimbangan bidang *parhyangan* dan *palemahan*. Kedepan penentuan bintang hotel salah satunya juga ditentukan oleh penilaian *Tri Hita Karana* ini.

Sebagai salah satu contoh untuk akreditasi Daerah Tujuan

Wisata (DTW) tahun 2012 secara keseluruhan ada 61 uraian (pernyataan) sebagai kriteria Tri Hita Karana DTW. Bidang Parhyangan terdiri atas 18 kriteria, bidang Pawongan terdiri atas 22 kriteria, dan bidang Palemahan terdiri atas 21 kriteria. Selanjutnya setiap kriteria itu dijabarkan menjadi 5 uraian *check list* atau tolak ukur penilaian.

Contoh kriteria bidang Palemahan DTW yaitu idealnya DTW memiliki batas-batas yang jelas. Idealnya DTW memiliki fasilitas/kawasan parkir. Idealnya DTW memiliki kantor pengelola yang baik beserta kelengkapan fasilitas P3K dan komunikasi. Idealnya DTW memiliki: (i) media informasi tentang objek (mis: brosur); (ii) usaha penunjang objek (mis: art shop, warung, dll); (iii) loket penjualan tiket; (iv) pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda; dan (v) ruang tunggu yang nyaman di kawasan DTW. Idealnya seluruh bangunan di DTW ini mencerminkan arsitektur tradisional Bali. Idealnya dipergunakan/memanfaatkan bahan-bahan lokal dalam arsitektur bangunan di DTW. Idealnya DTW punya taman yang mencerminkan unsur-unsur *panca mahabuta*. Idealnya DTW memiliki ruang terbuka hijau (RTH), minimal 3/9 bagian dari luas objek. Idealnya DTW selalu bersih. Idealnya DTW selalu aman. Idealnya DTW wajib memiliki tanaman langka. Idealnya DTW melakukan efisiensi penggunaan air bersih. Idealnya DTW harus ada sistem pengelolaan sampah yang memadai. Idealnya DTW memiliki wc dan kamar mandi yang bersih. Idealnya DTW melakukan efisiensi penggunaan listrik. Idealnya DTW melakukan efisiensi penggunaan air bersih. Idealnya pengelola DTW pernah berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan di sekitarnya. Idealnya DTW punya program/misi khusus yang bermanfaat bagi pelestarian lingkungan. Idealnya DTW pernah memperoleh penghargaan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. Idealnya aktivitas kerja di DTW tidak mengganggu kenyamanan lingkungan di sekitarnya. Idealnya DTW punya IPAL/STP dan berfungsi dengan baik.

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ekowisata merupakan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan. Hal ini nampaknya akan menjadi trend pariwisata ke depan atau menjadi salah satu ajang kompetisi di era global. Kegiatan ekowisata semestinya dibarengi dengan pemahaman konsep (prinsip dan kriteria) yang benar, penetapan standar, dan sertifikasi. Penjabaran dan penyempurnaan terus menerus kearifan tradisional yang berkaitan dengan konsep Tri Hita Karana menjadi penting untuk membumikan pembangunan (pengembangan lahan) berkelanjutan di Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1992, Strategi Pembangunan Berlanjut Bali, Proyek Pembangunan Bali Berlanjut, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Indonesia dan Universitas Waterloo, Waterloo Ontario bekerjasama dengan Universitas Udayana Denpasar Bali, University Consortium on the Environment.
- Anonim, 2001, Permukiman Untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan, Bahan Sidang Kabinen, 13 Desember 2001, Jakarta.
- Anonim, 2002, World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 August- 4 September 2002.
- Bapedalda Provinsi Bali dan Bali Travel News, 2012, *Buku Panduan Tri Hita Karana*, Yayasan Tri Hita Karana, Denpasar.
- Gunawan Tanuwidjaja, 2010, Pengembangan Perangkat Evaluasi Lahan (Alit) untuk Negara-negara Berkembang Dengan Studi Kasus Pulau Bintan Indonesia, Email: gunteitb@yahoo.com.
- Kaler, I G.K., 1982, *Butir-butir Tercecer Tentang Adat Bali 2*, Bali Agung, Denpasar.
- United Nations Division for Sustainable Development, 2007, Documents: Sustainable Development Issues Retrieved, 05-12-2007.